DINASTI ABBASIYAH: ANTARA REVOLUSI POLITIK DAN KEMAJUAN PERADABAN PENDIDIKAN ISLAM

Sitti Fatimah Az-zahra[1], Novala Arum Salsabillah[2], Kholid Mawardi[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[1]254120600057@mhs.uinsaizu.ac.id,
[2]254120600054@mhs.uinsaizu.ac.id,
[3]kholidmawardi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

This article examines the Abbasid Dynasty as an intersection between political revolution and the advancement of Islamic educational civilization. The study is motivated by the tendency of Islamic historical studies to separate political dynamics from educational development, although both were closely connected in shaping classical Islamic civilization. This research employs library research with a historical-analytical approach. Data were collected from books, journal articles, and relevant scholarly literature, then analyzed descriptively and critically through content analysis. The findings show that the Abbasid revolution did not merely mark a transfer of power from the Umayyad Dynasty but also introduced a more cosmopolitan political orientation that supported intellectual development. The caliphs' patronage of Bayt al-Hikmah, translation movements, madrasahs, libraries, and scholarly assemblies became a crucial factor in the advancement of Islamic education. However, the relationship between politics and education during the Abbasid period was also ambivalent, as state patronage could strengthen knowledge while simultaneously opening space for ideological intervention. This article concludes that the Abbasid intellectual tradition remains relevant to modern Islamic education, particularly in the integration of religious and scientific knowledge, the strengthening of literacy, research culture, educational institutions, and academic freedom.

Keywords: Abbasid Dynasty, political revolution, Islamic education, Islamic civilization.

ABSTRAK

Artikel ini membahas Dinasti Abbasiyah sebagai titik temu antara revolusi politik dan kemajuan peradaban pendidikan Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan studi sejarah Islam yang sering memisahkan aspek politik dari perkembangan pendidikan, padahal keduanya memiliki hubungan yang erat dalam membentuk kemajuan peradaban Islam klasik. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan historis-analitis. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis melalui teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa revolusi Abbasiyah tidak hanya menghasilkan perubahan kekuasaan dari Dinasti Umayyah, tetapi juga

membentuk orientasi politik yang lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap pengembangan ilmu. Dukungan khalifah terhadap Bayt al-Hikmah, gerakan penerjemahan, madrasah, perpustakaan, dan majelis ilmu menjadi faktor penting dalam kemajuan pendidikan Islam. Namun, relasi politik dan pendidikan pada masa Abbasiyah juga bersifat ambivalen karena patronase negara dapat memperkuat ilmu sekaligus membuka ruang intervensi ideologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa tradisi keilmuan Abbasiyah relevan bagi pendidikan Islam modern, terutama dalam integrasi ilmu, penguatan literasi, riset, kelembagaan, dan kebebasan akademik.

Kata Kunci: Dinasti Abbasiyah, revolusi politik, pendidikan Islam, peradaban Islam.

A. Pendahuluan

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode paling penting dalam perkembangan politik, ilmu pengetahuan, dan pendidikan Islam. Dinasti yang berdiri pada tahun 750 M ini lahir melalui revolusi politik yang berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam. Pergantian kekuasaan tersebut tidak hanya menjadi momentum transformasi politik, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya peradaban Islam yang maju dalam bidang pendidikan, intelektual, dan kebudayaan. Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia yang mempertemukan berbagai tradisi keilmuan dari Persia, Yunani, India, dan Arab (Zaitun, 2024).

Kemajuan peradaban pada masa Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik para khalifah yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun dikenal aktif mendukung kegiatan intelektual melalui pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat penerjemahan ilmu pengetahuan. Salah satu institusi yang paling terkenal adalah Bayt al-Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan lembaga tersebut menjadi simbol keterbukaan intelektual Dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban dunia (Nurhaliza dkk., 2025).

Dalam bidang pendidikan Islam, Dinasti Abbasiyah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dibandingkan masa sebelumnya. Pendidikan tidak lagi berlangsung secara sederhana di masjid atau rumah ulama, tetapi mulai berkembang melalui institusi formal seperti madrasah, perpustakaan, dan majelis ilmu. Tradisi ilmiah pada masa ini melahirkan banyak tokoh besar dalam berbagai disiplin ilmu, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Khawarizmi, yang kontribusinya tidak hanya berpengaruh terhadap dunia Islam tetapi juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, masa Abbasiyah sering disebut sebagai "golden age" atau masa keemasan peradaban Islam (Novita Fardani, 2024).

Di sisi lain, kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik yang relatif stabil pada periode tertentu. Revolusi politik yang menjadi awal berdirinya Dinasti Abbasiyah berhasil membangun legitimasi baru yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok non-Arab dalam pemerintahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut menciptakan ruang dialog intelektual yang luas sehingga mendorong berkembangnya budaya literasi, penerjemahan, dan penelitian ilmiah. Faktor internal berupa semangat keagamaan terhadap pentingnya ilmu, serta faktor eksternal berupa interaksi dengan peradaban lain, menjadi pendukung utama kemajuan pendidikan Islam pada masa itu (Amiruddin Dardiri dkk., 2023).

Namun demikian, kajian mengenai Dinasti Abbasiyah sering kali hanya menitikberatkan pada aspek politik atau kemajuan ilmu pengetahuan secara terpisah. Padahal, revolusi politik dan perkembangan pendidikan pada masa Abbasiyah memiliki hubungan yang erat dalam membentuk kemajuan peradaban Islam. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji bagaimana Dinasti Abbasiyah menjadi titik temu antara revolusi politik dan kemajuan peradaban pendidikan Islam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dunia Islam hingga masa modern. Kajian ini penting dilakukan agar generasi saat ini dapat memahami bahwa kemajuan pendidikan Islam

pada masa Abbasiyah tidak hanya dibangun oleh kekuatan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh stabilitas politik, keterbukaan budaya, dan dukungan terhadap tradisi intelektual.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan historis-analitis. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan Dinasti Abbasiyah, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk memahami kontribusi Abbasiyah terhadap kemajuan pendidikan Islam dan budaya intelektual Islam.

Sumber data diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan Dinasti Abbasiyah dan pendidikan Islam.

Data dianalisis menggunakan teknik content analysis, yaitu dengan menelaah isi literatur secara deskriptif-kritis untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan revolusi politik Dinasti Abbasiyah dengan perkembangan pendidikan Islam serta relevansinya terhadap pendidikan Islam modern.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Revolusi Politik dan Berdirinya Dinasti Abbasiyah

Berdirinya Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 M merupakan titik penting dalam sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan perubahan besar dalam bidang politik, sosial, dan intelektual. Dinasti ini lahir melalui revolusi politik yang berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah yang sebelumnya dianggap lebih mengutamakan kelompok Arab dan bersifat sentralistik. Gerakan Abbasiyah memperoleh dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kaum mawali (non-Arab Muslim), Persia, serta kelompok-kelompok yang merasa termarginalkan oleh pemerintahan Umayyah. Revolusi tersebut dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad saw., sehingga Dinasti Abbasiyah memperoleh legitimasi religius sekaligus politik di tengah masyarakat Islam (Arsyad dkk., 2024).

Perubahan politik yang dibawa Dinasti Abbasiyah tidak hanya berkaitan dengan pergantian kekuasaan, tetapi juga menyangkut transformasi sistem pemerintahan Islam. Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, sebuah wilayah yang secara strategis berada dekat dengan pusat peradaban Persia dan jalur perdagangan internasional. Pemindahan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya masyarakat kosmopolitan yang terbuka terhadap berbagai budaya dan ilmu pengetahuan. Kondisi ini berbeda dengan pemerintahan Umayyah yang lebih berorientasi pada ekspansi politik dan militer. Pada masa Abbasiyah, orientasi pemerintahan mulai diarahkan pada penguatan administrasi negara, pengembangan ekonomi, serta pembangunan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam (Zaitun, 2024).

Konsolidasi politik yang dilakukan para khalifah Abbasiyah turut menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi berkembangnya tradisi intelektual Islam. Khalifah seperti Abu al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Manshur berhasil membangun struktur pemerintahan yang lebih sistematis melalui penguatan birokrasi, pengelolaan fiskal negara, dan pembentukan pusat administrasi di Baghdad. Stabilitas politik tersebut kemudian membuka ruang berkembangnya aktivitas ilmiah dan pendidikan. Dalam konteks ini, revolusi Abbasiyah dapat dipahami bukan sekadar pergantian dinasti, tetapi sebagai awal lahirnya peradaban Islam yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya intelektual. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap para ulama, ilmuwan, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa awal Abbasiyah (Arsyad dkk., 2024).

Selain itu, keberhasilan Dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh kebijakan politik yang lebih inklusif dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dinasti Abbasiyah tidak hanya melibatkan bangsa Arab dalam pemerintahan, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok Persia dan non-Arab untuk berkontribusi dalam bidang administrasi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Keterbukaan tersebut

melahirkan interaksi intelektual yang mempercepat proses penerjemahan ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Situasi ini menjadi awal berkembangnya budaya ilmiah yang kemudian menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia Islam. Dengan demikian, revolusi politik Abbasiyah memiliki hubungan yang erat dengan lahirnya kemajuan pendidikan Islam, karena stabilitas kekuasaan dan keterbukaan sosial menjadi faktor penting dalam tumbuhnya tradisi keilmuan Islam klasik (Huda Hidayati dkk., 2025).

Kontribusi Dinasti Abbasiyah terhadap Pendidikan Islam

Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam. Pada masa ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas keagamaan yang berlangsung di masjid atau majelis ulama, tetapi berkembang menjadi sistem keilmuan yang terorganisasi dan didukung langsung oleh negara. Para khalifah Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan fasilitas pendidikan, mendukung aktivitas penerjemahan, serta memberi ruang luas bagi para ilmuwan untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu. Kebijakan tersebut menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam sekaligus simbol kemajuan peradaban Islam klasik. Dalam konteks ini, Dinasti Abbasiyah berhasil membangun fondasi pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada ilmu agama, tetapi juga ilmu rasional seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra (Nurhaliza dkk., 2025).

Menariknya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah justru mengalami kemajuan pesat ketika kondisi politik dinasti mulai menghadapi konflik internal dan persaingan kekuasaan. Secara historis, konflik politik seperti perebutan kekuasaan antar elit pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil, serta melemahnya kontrol khalifah tidak sepenuhnya menghentikan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, situasi tersebut mendorong munculnya banyak pusat pendidikan dan keilmuan baru di berbagai wilayah Islam. Para penguasa daerah dan elite politik berlomba-lomba menunjukkan legitimasi kekuasaan

melalui dukungan terhadap ulama, ilmuwan, perpustakaan, dan lembaga pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika politik Abbasiyah tidak selalu berdampak negatif terhadap pendidikan, tetapi dalam beberapa kondisi justru melahirkan kompetisi intelektual yang mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan Islam (Amiruddin Dardiri dkk., 2023).

Kemajuan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah juga ditandai dengan lahirnya tradisi madrasah sebagai institusi pendidikan formal dalam dunia Islam. Sebelum berkembangnya madrasah, proses pendidikan lebih banyak berlangsung secara informal di masjid, rumah ulama, atau halaqah-halaqah keilmuan. Namun, kebutuhan terhadap sistem pendidikan yang lebih terstruktur mendorong lahirnya madrasah yang memiliki kurikulum, tenaga pengajar, serta sistem pembelajaran yang lebih terorganisasi. Salah satu madrasah yang terkenal adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 M. Kehadiran madrasah tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam karena memperlihatkan adanya integrasi antara kekuatan politik dan pengembangan pendidikan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai pelindung dan penggerak perkembangan ilmu pengetahuan (Murtopo, 2014).

Selain madrasah, Dinasti Abbasiyah juga melahirkan budaya intelektual Islam yang sangat kuat melalui gerakan penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bayt al-Hikmah yang didirikan pada masa Khalifah al-Ma'mun menjadi simbol keterbukaan intelektual Abbasiyah terhadap berbagai peradaban dunia. Melalui lembaga tersebut, karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim menjadi ilmu pengetahuan baru yang lebih maju. Tradisi ilmiah ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Khawarizmi yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Budaya intelektual pada masa Abbasiyah menunjukkan bahwa pendidikan Islam berkembang melalui sikap terbuka terhadap ilmu

pengetahuan dan dialog antarperadaban, bukan melalui sikap eksklusif terhadap tradisi tertentu (Arsyad dkk., 2024).

Kontribusi Dinasti Abbasiyah terhadap pendidikan Islam tidak hanya terlihat pada pembangunan institusi pendidikan, tetapi juga pada terciptanya iklim intelektual yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan secara luas. Dinasti Abbasiyah berhasil menunjukkan bahwa pendidikan dapat berkembang secara optimal ketika didukung oleh keterbukaan budaya, penghargaan terhadap ilmu, serta dukungan politik terhadap aktivitas intelektual. Bahkan di tengah konflik politik yang terjadi, tradisi keilmuan tetap mampu berkembang karena adanya kesadaran bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam membangun legitimasi dan kejayaan peradaban Islam. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa hubungan antara politik dan pendidikan pada masa Abbasiyah bersifat dinamis dan saling memengaruhi dalam membentuk kemajuan peradaban Islam.

Hubungan Politik dan Kemajuan Pendidikan

Kemajuan pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perkembangan alamiah tradisi keilmuan umat Islam, melainkan sebagai hasil dari konfigurasi politik yang relatif sadar ilmu. Revolusi Abbasiyah terhadap Dinasti Umayyah membawa perubahan penting dalam orientasi kekuasaan: dari dominasi aristokrasi Arab menuju struktur politik yang lebih terbuka terhadap unsur non-Arab, terutama Persia dan kelompok mawali. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap perluasan basis sosial pendidikan, sebab kelompok-kelompok yang sebelumnya berada pada posisi subordinat memperoleh ruang lebih besar dalam birokrasi, administrasi, dan produksi pengetahuan. Dalam konteks inilah pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang bukan hanya sebagai aktivitas keagamaan di masjid, tetapi sebagai instrumen peradaban yang berkaitan erat dengan konsolidasi negara, legitimasi kekuasaan, dan pembentukan identitas intelektual Islam kosmopolitan. Kajian (Amiruddin Dardiri dkk., 2023) menegaskan

bahwa kondisi sosial-politik Abbasiyah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendidikan Islam, terutama karena relasi kuasa negara ikut menentukan arah, bentuk, dan corak keilmuan yang dikembangkan.

Pada fase awal, politik Abbasiyah membangun legitimasi melalui klaim genealogis terhadap keluarga Nabi dan dukungan kelompok yang kecewa terhadap kebijakan Umayyah. Namun, setelah kekuasaan berhasil direbut, legitimasi tidak cukup dipertahankan dengan simbol keturunan atau kekuatan militer. Kekhalifahan memerlukan perangkat kultural-intelektual untuk menunjukkan bahwa Abbasiyah bukan sekadar rezim pengganti, melainkan pusat baru peradaban Islam. Di sinilah pendidikan memperoleh fungsi politik yang strategis. Dukungan khalifah terhadap ilmu pengetahuan, penerjemahan, perpustakaan, dan majelis ilmiah dapat dibaca sebagai strategi untuk membangun citra kekuasaan yang beradab, rasional, dan unggul dibandingkan dinasti sebelumnya. Dengan demikian, kemajuan pendidikan Abbasiyah tidak netral dari kepentingan politik; ia lahir dari kebutuhan negara untuk mengelola masyarakat majemuk, memperkuat otoritas pusat, dan menciptakan simbol keunggulan peradaban.

Hubungan antara politik dan pendidikan tampak paling jelas pada masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Pada periode ini, patronase negara terhadap ilmu pengetahuan berkembang secara intensif melalui pendirian dan penguatan Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat penerjemahan, penelitian, diskusi ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan (Kamalia & Imawan, 2025). Dengan demikian, Baitul Hikmah merupakan contoh konkret bagaimana keputusan politik negara mampu melahirkan ekosistem pendidikan yang produktif.

Namun, patronase politik terhadap pendidikan pada masa Abbasiyah perlu dibaca secara kritis. Dukungan negara memang mempercepat kemajuan ilmu, tetapi pada saat yang sama negara juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan orientasi keilmuan sesuai dengan kepentingan ideologisnya. Pada masa al-Ma'mun, misalnya, kedekatan kekuasaan dengan rasionalisme teologis

Mu'tazilah menunjukkan bahwa pendidikan dan ilmu kalam tidak sepenuhnya bergerak dalam ruang akademik yang bebas dari intervensi politik (Arsyad dkk., 2024). Artinya, kemajuan pendidikan Abbasiyah membawa dua sisi sekaligus: di satu sisi memperluas tradisi rasional, penerjemahan, dan penelitian; di sisi lain membuka peluang politisasi ilmu ketika negara menjadikan doktrin tertentu sebagai instrumen legitimasi.

Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi Abbasiyah memberikan syarat material bagi perkembangan pendidikan. Pendidikan memerlukan pembiayaan, lembaga, ruang diskusi, guru, koleksi buku, dan jaringan ilmuwan. Semua unsur tersebut sulit tumbuh tanpa dukungan politik yang memadai. Karena itu, kemajuan pendidikan Abbasiyah memperlihatkan bahwa peradaban ilmu tidak hanya bergantung pada semangat keagamaan, tetapi juga pada kebijakan publik yang memberi tempat bagi ilmu. Esensi emas pendidikan era Abbasiyah tidak luput dari peran utama khalifah, institusi madrasah, dan lembaga Baitul Hikmah (Taufik & Bahar, 2026). Dengan kata lain, pendidikan Islam pada masa Abbasiyah berkembang karena adanya hubungan fungsional antara kekuasaan politik, institusi pendidikan, dan komunitas ilmiah.

Perubahan karakter pendidikan juga tampak pada perluasan lembaga dan metode pembelajaran. Pendidikan tidak lagi hanya berlangsung dalam bentuk pengajaran dasar di kuttab atau halaqah masjid, tetapi berkembang ke rumah ulama, perpustakaan, toko buku, majelis sastra, rumah sakit, observatorium, dan kemudian madrasah. Kajian (Rizky, 2024) tentang konsep pendidikan Abbasiyah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pada masa ini mencakup kuttab, masjid, perpustakaan, madrasah, serta tingkatan pendidikan rendah, menengah, dan tinggi serta metode yang digunakan pun meliputi dikte, ceramah, diskusi, hafalan, dan praktik. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan politik yang kondusif tidak hanya memperbanyak lembaga pendidikan, tetapi juga mendorong diferensiasi fungsi lembaga: sebagian berperan sebagai pusat transmisi ilmu agama, sebagian sebagai pusat kajian rasional, dan sebagian lain sebagai

tempat pengembangan ilmu praktis seperti kedokteran, astronomi, dan matematika.

Secara analitis, relasi politik dan pendidikan Abbasiyah dapat dipahami melalui tiga pola. Pertama, politik berperan sebagai fasilitator melalui patronase khalifah terhadap ulama, penerjemah, filsuf, dokter, astronom, dan ilmuwan. Kedua, politik berfungsi sebagai regulator yang menentukan bahasa, orientasi, dan legitimasi keilmuan; penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu memperkuat integrasi intelektual dunia Islam. Ketiga, politik dapat menjadi instrumen ideologis yang mengarahkan pendidikan untuk menopang kepentingan mazhab, teologi, atau otoritas tertentu. Pola ketiga ini penting ditekankan agar pembahasan tidak jatuh pada romantisasi "masa keemasan" Abbasiyah. Kemajuan pendidikan memang nyata, tetapi tidak selalu steril dari konflik, seleksi ideologis, dan perebutan otoritas keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kemajuan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah merupakan produk dari interaksi kompleks antara stabilitas politik, patronase negara, keterbukaan sosial, kemakmuran ekonomi, dan kebutuhan legitimasi kekuasaan. Revolusi politik Abbasiyah membuka ruang bagi transformasi sosial yang lebih kosmopolitan, sementara kebijakan para khalifah mengubah ilmu pengetahuan menjadi bagian dari proyek peradaban. Akan tetapi, kemajuan tersebut juga menyimpan ambivalensi. Ketika negara mendukung ilmu, pendidikan memperoleh sumber daya besar, tetapi ketika negara terlalu jauh mengarahkan doktrin, pendidikan berpotensi kehilangan otonomi intelektualnya. Oleh sebab itu, hubungan politik dan pendidikan pada masa Abbasiyah dapat disimpulkan sebagai hubungan produktif sekaligus problematis. Produktif karena melahirkan lembaga, tradisi ilmiah, dan integrasi ilmu agama-sains, dan problematis karena pendidikan juga menjadi arena legitimasi kekuasaan dan kontestasi ideologi. Pembacaan kritis ini penting agar kajian tentang Abbasiyah tidak hanya menampilkan narasi kejayaan, tetapi juga memahami mekanisme historis yang memungkinkan kemajuan pendidikan Islam lahir, berkembang, dan kemudian mengalami perubahan seiring dinamika politik kekhalifahan.

Relevansi Tradisi Keilmuan Abbasiyah terhadap Pendidikan Islam Modern

Tradisi keilmuan Dinasti Abbasiyah memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam modern karena memperlihatkan bahwa kemajuan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik, kebijakan negara, dan orientasi peradaban. Revolusi politik Abbasiyah tidak hanya menghasilkan pergantian dinasti dari Umayyah kepada Abbasiyah, tetapi juga mengubah lanskap sosial-intelektual dunia Islam. Pergeseran pusat kekuasaan ke Baghdad membuka ruang interaksi yang lebih luas antara tradisi Arab-Islam, Persia, Yunani, India, dan berbagai khazanah keilmuan lain. Dari konteks ini tampak bahwa pendidikan Islam pada masa Abbasiyah berkembang bukan dalam ruang tertutup, melainkan melalui perjumpaan lintas budaya yang dikelola oleh kekuasaan politik secara relatif produktif. Relevansinya bagi pendidikan Islam modern terletak pada pentingnya membangun sistem pendidikan yang terbuka, dialogis, dan mampu menyerap perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan basis nilai keislaman (Hazim dkk., 2025).

Salah satu warisan terpenting Abbasiyah bagi pendidikan Islam modern adalah paradigma integrasi ilmu. Pada masa Abbasiyah, ilmu agama dan ilmu rasional tidak diposisikan secara diametral sebagai dua wilayah yang saling menegasikan. Kajian Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa, filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu-ilmu praktis berkembang dalam satu ekosistem keilmuan yang saling berhubungan. Pola ini relevan dengan persoalan pendidikan Islam kontemporer yang masih sering menghadapi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam modern tidak cukup hanya menambahkan mata pelajaran keagamaan dalam kurikulum umum, atau memasukkan sains ke dalam lembaga keagamaan secara administratif. Yang lebih mendasar adalah membangun cara pandang keilmuan yang memadukan nilai spiritual, rasionalitas ilmiah, etika sosial, dan orientasi kemaslahatan (Matin Shopwan Amarullah, 2024).

Relevansi tradisi Abbasiyah juga tampak pada pentingnya dukungan kelembagaan terhadap

pengembangan ilmu. Kemajuan pendidikan pada masa Abbasiyah tidak semata-mata lahir dari kecerdasan individual ulama dan ilmuwan, tetapi juga dari tersedianya lembaga, patronase politik, perpustakaan, ruang diskusi, pusat penerjemahan, dan jaringan intelektual. Bayt al-Hikmah menjadi simbol bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan ekosistem yang memungkinkan ilmu dipelajari, diterjemahkan, diuji, dikembangkan, dan disebarluaskan. Dalam konteks pendidikan Islam modern, hal ini memberi pelajaran bahwa lembaga pendidikan Islam tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengajaran rutin. Madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi keagamaan Islam perlu diperkuat sebagai pusat literasi, riset, inovasi, dan produksi pengetahuan. Pendidikan Islam akan sulit berkembang apabila hanya dipahami sebagai ruang pewarisan tradisi, tanpa disertai agenda pengembangan ilmu yang terencana dan berkelanjutan (Rizky, 2024).

Dalam konteks hubungan politik dan pendidikan, pengalaman Abbasiyah menunjukkan bahwa kebijakan politik yang berpihak kepada ilmu dapat mempercepat pertumbuhan peradaban pendidikan. Para khalifah Abbasiyah menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan dan simbol keunggulan peradaban. Dukungan terhadap penerjemahan, penghargaan kepada ilmuwan, pengembangan perpustakaan, serta pembiayaan kegiatan intelektual menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam memajukan pendidikan. Relevansi historis ini penting bagi pendidikan Islam modern, terutama di Indonesia, karena kualitas pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh keberpihakan kebijakan publik. Ketika negara dan lembaga pendidikan memberi perhatian serius pada mutu guru, riset, literasi, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan, pendidikan Islam dapat bergerak dari sekadar institusi transmisi nilai menuju pusat transformasi sosial dan intelektual.

Akan tetapi, hubungan antara politik dan pendidikan pada masa Abbasiyah juga perlu dibaca secara kritis. Dukungan politik terhadap ilmu memang menghasilkan kemajuan besar, tetapi pada saat yang sama membuka kemungkinan intervensi kekuasaan terhadap orientasi keilmuan. Ketika negara terlalu jauh

menentukan arah pemikiran keagamaan atau menjadikan doktrin tertentu sebagai legitimasi resmi, pendidikan dapat kehilangan otonomi kritisnya (Amiruddin Dardiri dkk., 2023). Oleh karena itu, relevansi Abbasiyah bagi pendidikan Islam modern bukan hanya terletak pada keberhasilan patronase negara terhadap ilmu, tetapi juga pada pelajaran tentang batas-batas relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Pendidikan Islam modern membutuhkan dukungan politik, tetapi dukungan tersebut seharusnya diarahkan untuk memperluas kebebasan akademik, memperkuat mutu kelembagaan, dan mendorong riset, bukan untuk menyeragamkan pemikiran secara ideologis.

Tradisi keilmuan Abbasiyah juga relevan bagi pembaruan metode pembelajaran pendidikan Islam modern. Pendidikan pada masa Abbasiyah tidak hanya bertumpu pada hafalan, tetapi juga mengenal diskusi, debat ilmiah, penulisan, pengamatan, penerjemahan, dan praktik. Keragaman metode ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam klasik memiliki dimensi intelektual yang dinamis. Dalam pendidikan Islam modern, hafalan tetap penting, terutama dalam penguasaan Al-Qur'an, hadis, dan teks-teks dasar keislaman. Namun, hafalan harus dilengkapi dengan pemahaman analitis, kemampuan kontekstualisasi, argumentasi ilmiah, dan keterampilan memecahkan masalah (Sri Utari dkk., 2024). Dengan demikian, pembelajaran pendidikan Islam tidak berhenti pada reproduksi pengetahuan, tetapi bergerak menuju pembentukan nalar kritis, etika ilmiah, dan kepekaan sosial.

Relevansi berikutnya dapat dilihat dari kuatnya budaya literasi dalam tradisi Abbasiyah. Kemajuan pendidikan Abbasiyah ditopang oleh aktivitas membaca, menyalin, menerjemahkan, mengomentari, mengkritik, dan mengembangkan karya ilmiah. Tradisi ini penting untuk dihidupkan kembali dalam pendidikan Islam modern, terutama ketika lembaga pendidikan menghadapi tantangan rendahnya budaya baca, lemahnya riset, dan dominannya pembelajaran yang berorientasi pada hafalan administratif. Pendidikan Islam modern perlu mengembangkan budaya akademik yang tidak hanya menghormati otoritas keilmuan masa lalu, tetapi juga mampu membaca ulang warisan tersebut dalam konteks

persoalan kontemporer. Literasi kitab klasik, literasi digital, literasi sains, dan literasi sosial perlu dipadukan agar peserta didik mampu memahami tradisi sekaligus merespons perubahan zaman secara kritis dan kreatif.

Tradisi keilmuan Abbasiyah memberikan dasar historis bagi pengembangan pendidikan Islam modern yang integratif, terbuka, kritis, dan berorientasi peradaban. Kemajuan Abbasiyah menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat berkembang pesat ketika didukung oleh stabilitas politik, patronase keilmuan, keterbukaan intelektual, dan kelembagaan yang kuat. Namun, pengalaman Abbasiyah juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh sepenuhnya tunduk pada kepentingan politik kekuasaan. Relevansi utama tradisi Abbasiyah bagi pendidikan Islam modern bukanlah pada peniruan bentuk kelembagaan masa lalu, melainkan pada penguatan spirit keilmuan: menjadikan ilmu sebagai pusat pembangunan umat, mengintegrasikan agama dan sains, membangun budaya riset, serta menjaga kebebasan berpikir dalam bingkai nilai-nilai Islam. Dengan pembacaan seperti ini, pendidikan Islam modern dapat mengambil inspirasi dari Abbasiyah secara kritis, bukan romantik, sehingga mampu menjadi kekuatan transformatif dalam menghadapi tantangan zaman.

D. Kesimpulan

Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu fase penting dalam sejarah peradaban Islam karena berhasil menghubungkan revolusi politik dengan kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Revolusi Abbasiyah tidak hanya menandai pergantian kekuasaan dari Dinasti Umayyah, tetapi juga menghadirkan perubahan orientasi pemerintahan yang lebih kosmopolitan, inklusif, dan terbuka terhadap berbagai tradisi keilmuan. Pergeseran pusat kekuasaan ke Baghdad menjadi momentum penting bagi terbentuknya pusat peradaban Islam yang mempertemukan tradisi Arab, Persia, Yunani, dan India dalam satu ekosistem intelektual yang produktif.

Kemajuan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah lahir dari hubungan yang erat antara stabilitas politik, patronase khalifah, keterbukaan budaya, dan penguatan kelembagaan ilmu. Dukungan

terhadap Bayt al-Hikmah, gerakan penerjemahan, perpustakaan, madrasah, majelis ilmu, serta penghargaan terhadap ulama dan ilmuwan menunjukkan bahwa pendidikan menjadi bagian dari proyek peradaban sekaligus instrumen legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, politik tidak hanya berperan sebagai pengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator berkembangnya tradisi intelektual Islam.

Namun demikian, hubungan politik dan pendidikan pada masa Abbasiyah juga bersifat ambivalen. Di satu sisi, patronase negara mampu mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas akses pendidikan. Di sisi lain, keterlibatan politik yang terlalu dominan berpotensi mengarahkan ilmu kepada kepentingan ideologis tertentu. Oleh karena itu, pembacaan terhadap kemajuan Abbasiyah perlu dilakukan secara kritis, bukan sekadar romantik. Relevansi utama tradisi Abbasiyah bagi pendidikan Islam modern terletak pada pentingnya integrasi ilmu agama dan sains, penguatan budaya literasi dan riset, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu, serta perlunya dukungan kebijakan pendidikan yang tetap menjaga otonomi akademik. Dengan demikian, pengalaman Abbasiyah dapat menjadi inspirasi historis bagi pengembangan pendidikan Islam modern yang integratif, kritis, dan berorientasi pada kemajuan peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin Dardiri, M., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *24*(1), 69–82. https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318

Arsyad, M. M., Zain, M., & Rama, B. (2024). Dinasti Abbasiyah: Biografi Khalifah, Kebijakan Politik, Pengaruh, dan Kegemilangan Peradaban Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *4*(1), 85–98. https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6276

Hazim, M., Firmansyah, H., Tajudin Zuhri, M., & Munawaroh, N. (2025). Pemikiran dan Peradaban Islam Dinasti Umayyah dan Abbasiyah: Kajian Historis dan Relevansi Warisan Intelektual dan Peradaban Islam Dalam Dunia Kontemporer. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, *7*(2), 629–642. https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1794

Huda Hidayati, N., Nasir, M., & Sugiyono. (2025). Kontribusi Faktor Internal dan Eksternal Kelahiran Peradaban Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Basataka*, *8*(2), 1530–1535.

Kamalia, S., & Imawan, D. H. (2025). The Contribution of Baitul Hikmah to The Development of Science and Education During The Abbasid Dynasty. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, *12*(2), 367–385. https://doi.org/10.58518/madinah.v12i2.4054

Matin Shopwan Amarullah, M. (2024). Peran Pendidikan dalam Kebangkitan Peradaban Islam: Analisis Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 45331–45338.

Murtopo, A. (2014). Politik Pendidikan Pada Masa Daulah Abbasiyah (Kasus Madrasah Nizhamiyah di Baghdad). *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, *19*(02), 313–332.

Novita Fardani, D. (2024). Pengaruh Pemikiran-Pemikiran Ulama Islam Pada Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Islam di Era Modern. *ISEDU : Islamic Education Journal*, *2*(1), 21–29. https://doi.org/10.59966/isedu.v2i1.904

Nurhaliza, Dewi, E., & Tampubolon, A. (2025). Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(4), 448–473.

Rizky, M. (2024). Konsep Pendidikan Pada Masa Dinasti Abbasiyah dan Relevansinya di Era Digital. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, *7*(2), 131–139. https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi

Sri Utari, A., Nova Dayantri, M., & Yulia, F. (2024). Konsep Metodologi Pendidikan Islam Klasik dan Relevansinya Dengan Masa Modern. *Jurnal Reflektika*, *19*(1), 141–171.

Taufik, M., & Bahar, H. (2026). Peran Khalifah, Madrasah, dan Baitul Hikmah dalam Membangun Sistem Pendidikan di Era Abbasyiah. *Tafhim Al-`Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, *17*(2), 368–382.

Zaitun, A. (2024). Pengaruh Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Peradaban Islam. *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan, & Sosial Keagamaan*, *3*(2), 113–124.